



## **Pengambilan Keputusan Strategis Melalui Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Dalam Penanggulangan Kejahatan Konvensional Di Polres Cimahi**

**Andry Fran Ferdyawan<sup>1</sup>**

Sespimmen Lemdiklat Polri, Indonesia

[andryfranf42dk@gmail.com](mailto:andryfranf42dk@gmail.com)

Riwayat artikel:

Diterima 05/09/2025

Direvisi 05/09/2025

Disetujui 05/09/2025

### **ABSTRAK**

Kejahatan konvensional masih menjadi tantangan serius bagi Polres Cimahi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Data tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, sebanyak 2.106 kasus pada Tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1.731 kasus pada Tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 2.340 kasus pada Tahun 2024. Kondisi ini menuntut strategi penanggulangan yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengambilan keputusan strategis melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam penanggulangan kejahatan konvensional di Polres Cimahi. Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena faktual serta kuantitatif melalui analisis EFAS, IFAS, dan SFAS dengan teknik *pairwise comparison* untuk menentukan bobot faktor strategis. Hasil penelitian menunjukkan sepuluh faktor kunci yang diprioritaskan. Strategi jangka pendek meliputi peningkatan kompetensi penyidik, penataan personel, partisipasi masyarakat, dan dukungan anggaran. Strategi jangka sedang berfokus pada penekanan peredaran miras dan narkoba, pemanfaatan teknologi informasi, serta penanggulangan geng motor. Sedangkan strategi jangka panjang diarahkan pada pemantapan program “*Lapor Pak Kapolres*”, penguatan peran tokoh masyarakat, dan peningkatan giat preemptif. Kesimpulannya, metode AHP efektif dalam merumuskan strategi pengambilan keputusan yang sistematis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan, sehingga mendukung upaya penanggulangan kejahatan konvensional secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kejahatan Konvensional; AHP; SFAS; Pengambilan Keputusan Strategis; Polres Cimahi.

## PENDAHULUAN

Kejahatan konvensional masih menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Cimahi. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, tren kejahatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, jumlah crime total (CT) mencapai 2.106 kasus, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 1.731 kasus. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat tajam hingga mencapai 2.340 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan konvensional di wilayah Polres Cimahi masih sulit ditekan secara konsisten, sehingga menuntut adanya strategi penanggulangan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Polres Cimahi tidak hanya dapat mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu mengedepankan strategi preemtif dan preventif agar potensi kejahatan dapat ditekan sejak dini. Penentuan cara bertindak yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi setiap unit fungsi kepolisian dalam menyusun langkah operasional, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan strategis yang akurat, responsif, dan sesuai dengan dinamika lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan strategis di tingkat kepolisian seringkali menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-prasarana menjadi faktor internal yang membatasi ruang gerak kepolisian. Sementara itu, faktor eksternal berupa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, menuntut kepolisian untuk selalu melakukan adaptasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang mampu membantu proses pengambilan keputusan strategis secara sistematis, objektif, dan terukur.

Salah satu metode pengambilan keputusan yang relevan untuk digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut T. L. Saaty (1980), AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang mampu menguraikan permasalahan kompleks ke dalam struktur hierarki, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas berdasarkan kriteria yang ada. Metode ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengambilan keputusan di sektor publik, karena mampu mengintegrasikan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif (Saaty, 2008). Dalam organisasi kepolisian, AHP dapat membantu dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan AHP dalam pengambilan keputusan strategis terbukti efektif. Dalam konteks keamanan, Hidayat & Taufik (2019) menggunakan AHP untuk menentukan strategi optimal dalam pencegahan kejahatan di wilayah perkotaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan prioritas tindakan. Junianto (2022) melalui penelitiannya di Polsek Koto Baru, Dharmasraya, menerapkan AHP dalam sistem pendukung keputusan pencegahan kasus kejahatan seperti pencurian dan penggeroyokan, yang hasilnya mampu meningkatkan ketepatan analisis dalam konteks lokal. Sementara itu, penelitian di Universitas Gadjah Mada mengombinasikan AHP dengan metode peramalan *Triple Exponential Smoothing* (TES) untuk menentukan prioritas waktu patroli berdasarkan pola kejahatan harian, dan terbukti menghasilkan skala prioritas yang konsisten serta valid ( $CR \leq 0,1$ ). Dengan demikian, penerapan AHP dalam penentuan strategi penanggulangan kejahatan konvensional di Polres Cimahi menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan strategis melalui metode AHP dalam penanggulangan kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian manajemen kepolisian serta kontribusi praktis dalam mendukung kebijakan Polres Cimahi dalam menjaga kamtibmas secara lebih efektif dan berkelanjutan..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh (Sugiyono, 2018). Secara kualitatif, pendekatan deskriptif analisis dipakai untuk menggambarkan fenomena, fakta, dan permasalahan penanggulangan kejahatan berdasarkan literatur, regulasi, serta hasil observasi. Secara kuantitatif, analisis dilakukan melalui manajemen strategis menggunakan EFAS, IFAS, dan SFAS dengan teknik *pairwise comparison* serta pembobotan faktor strategis. Hasil pembobotan disintesiskan guna merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang terarah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tren Kejahatan

Data tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kejahatan di wilayah hukum Polres Cimahi. Pada Tahun 2022 tercatat 2.106 kasus dengan tingkat penyelesaian 41,6%. Tahun 2023 terjadi penurunan kasus menjadi 1.731 dengan peningkatan penyelesaian yang signifikan hingga 97,1%. Namun pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 2.340 kasus dengan tingkat penyelesaian 57%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun upaya represif dapat meningkatkan penyelesaian kasus, namun tingkat kriminalitas tetap sulit ditekan secara konsisten.

### Upaya Penanggulangan Kejahatan Konvensional

Dalam upaya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Polres Cimahi mengedepankan langkah-langkah preemptif sebagai upaya awal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya preemptif ini diarahkan untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menanamkan budaya tertib di tengah masyarakat sebelum potensi kriminalitas terjadi. Berdasarkan data kegiatan preemptif Polres Cimahi dalam tiga tahun terakhir, upaya preemptif dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan yang bersifat pembinaan, beberapa diantaranya yaitu: DDS, *Police go to School*, Sinergitas TNI Polri, Siskamling, Jumat Curhat, Sambang Tomas dan Toga, dll. Terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi jumlah maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat dan Pokdar Kamtibmas juga sudah cukup baik, melihat jangkauan wilayah hukum yang luas dengan keterbatasan personel yang dimiliki Polres Cimahi dapat meringankan beban dalam hal pembinaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indeks *Community Policing* yang dicapai oleh Polres Cimahi pada tahun 2024. Berdasarkan data, Indeks *Community Policing* pada tahun 2024 menunjukkan target sebesar 4,10 dengan realisasi 4,16, sehingga capaian kinerja mencapai 101%. Sementara pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 3,95 dengan realisasi 3,97, juga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun capaian indeks *community policing* cukup tinggi, namun berdasarkan fakta di lapangan masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan *Community Policing*, hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas dan sebagian mereka lebih mementingkan kesibukannya masing-masing, sehingga kurang optimal dalam mendukung tugas Kepolisian dalam memelihara Kamtibmas. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Polri masih relatif rendah, ditambah adanya persepsi yang keliru bahwa *Community Policing* bukan merupakan kebutuhan warga untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan maupun menyelesaikan persoalan (*problem solving*) sosial kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

Selain kegiatan preemptif, Polres Cimahi juga melakukan serangkaian kegiatan preventif melalui Turjawali dan razia guna melaksanakan cipta kondisi di wilayah hukum Polres Cimahi untuk menghilangkan niat dan kesempatan terhadap tindak kejahatan. Sejumlah kegiatan preventif telah dilaksanakan oleh Polres Cimahi. Dalam tiga tahun terakhir, upaya preventif Polres Cimahi sudah cukup masif dan variatif, namun masih ada titik-titik rawan yang belum terjangkau dikarenakan

terdapat kendala dalam distribusi sumber daya, mengingat wilayah hukum yang luas dan titik rawan yang cukup banyak, serta jaraknya yang berjauhan mengakibatkan giat patroli tidak bisa dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan.

Tindakan represif menjadi langkah akhir yang ditempuh untuk menekan tingkat kriminalitas sekaligus mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berdasarkan data (terlampir), penyelesaian kasus dalam tiga tahun terakhir justru mengalami penurunan sehingga masih menyisakan tunggakan kasus. Di mana pada tahun 2022 jumlah penyelesaian kasus (CC) sebesar 41,6%, tahun 2023 sebesar 97,1%, dan 2024 sebesar 57%. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah penyidik, khususnya di tingkat Polsek, masih terbatas dan belum seluruhnya memenuhi standar kualifikasi penyidik (data terlampir). Hal ini berdampak pada lamanya proses penyidikan, bertambahnya jalur birokrasi administrasi, serta keharusan personel unit Reskrim Polsek untuk terus berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dalam setiap langkah penyidikan. Selain itu, keterbatasan anggaran Lidik Sidik juga menjadi hambatan (data terlampir), terutama pada penanganan kasus yang sudah tahap SPDP maupun P21 yang tidak memperoleh dukungan anggaran. Meski demikian, penyelesaian kasus tetap diupayakan secara optimal.

### Kondisi Lingkungan Strategis

Analisis terhadap lingkungan eksternal (EFAS) mengidentifikasi faktor peluang dalam penanggulangan kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Cimahi diantaranya: dukungan stakeholder, peran media massa, serta perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini Kamtibmas. Di sisi lain, faktor ancaman yang perlu diwaspadai meliputi luasnya wilayah hukum, fenomena geng motor, peredaran miras ilegal, hingga sikap cuek sebagian masyarakat terhadap keamanan.

**Tabel 1. External Factors Analysis Summary (EFAS)**

No.	Faktor Kunci Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	<b>Peluang</b>			
1	Perkembangan teknologi	0.115	7	0.804
2	Dukungan stakeholder	0.093	6	0.556
3	Peran media massa	0.089	6	0.532
4	Peran Tomas/Toga	0.104	8	0.830
	<b>Jumlah</b>	0.400		2.722
	<b>Ancaman</b>			
1	Wilayah hukum luas	0.078	3	0.233
2	Kesenjangan ekonomi	0.084	2	0.167
3	Fenomena geng motor & kenakalan remaja	0.118	5	0.589
4	Peredaran miras ilegal & narkoba	0.137	5	0.686
5	Sikap cuek masyarakat	0.105	5	0.524
6	Arus urbanisasi	0.079	2	0.158
	<b>Jumlah</b>	<b>0.600</b>		<b>2.357</b>
	<b>Total</b>	<b>1.000</b>		<b>5.079</b>

Berdasarkan proses AHP melalui *pairwise comparison* pada faktor eksternal didapatkan hasil total skor EFAS sebesar 5.079.

Analisis terhadap lingkungan internal (IFAS) memperlihatkan faktor kekuatan berupa peningkatan giat preemptif, capaian *indeks community policing*, dan inovasi program *Lapor Pak Kapolres*. Namun faktor kelemahan yang muncul adalah keterbatasan personel, kompetensi penyidik, keterbatasan anggaran, serta masih adanya pelanggaran personel.

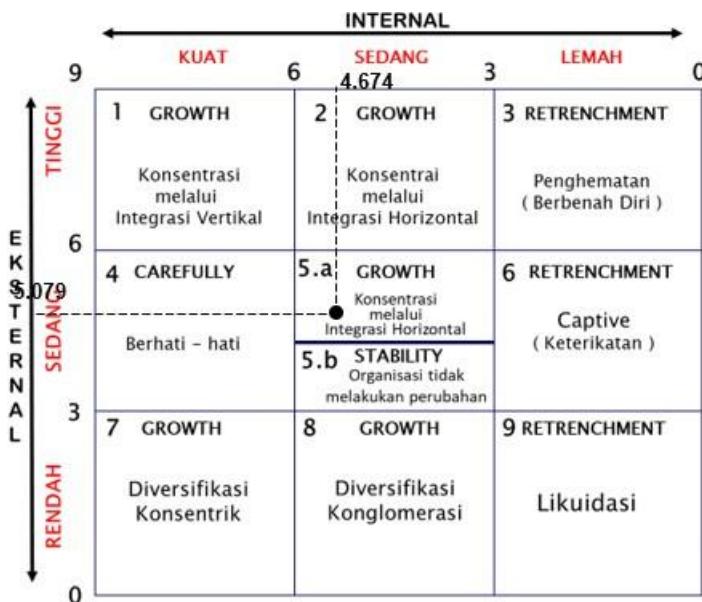
**Tabel 2. Internal Factors Analysis Summary (IFAS)**

No.	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>				
1	<b>Giat preemptif</b>	0.115	7	0.804
2	<i>Community policing</i>	0.093	7	0.648
3	Penggunaan media sosial	0.089	6	0.532
4	<b>Program "Lapor Pak Kapolres"</b>	0.104	8	0.830
<b>Jumlah</b>		<b>0.400</b>		<b>2.815</b>
<b>Kelemahan</b>				
1	<b>Jumlah personel</b>	0.140	3	0.419
2	<b>Kompetensi penyidik</b>	0.139	3	0.418
3	<b>Anggaran lidik sidik</b>	0.118	4	0.471
4	Jangkauan patroli	0.068	3	0.204
5	Pelanggaran personel	0.058	2	0.117
6	Penyelesaian kasus	0.077	3	0.231
<b>Jumlah</b>		<b>0.600</b>		<b>1.859</b>
<b>Total</b>		<b>1.000</b>		<b>4.674</b>

Berdasarkan proses AHP melalui *pairwise comparison* pada faktor internal didapatkan hasil total skor IFAS sebesar 4.674.

Berdasarkan perpotongan axis dari skor EFAS dan IFAS, posisi organisasi berada pada kuadran 5a yaitu strategi integrasi horizontal, yang menuntut optimalisasi sumber daya yang ada.

**Gambar 1. Analisis Posisi Organisasi**



#### Penerapan Metode AHP dalam Penentuan Strategi

Berdasarkan analisis EFAS dan IFAS, diperoleh sepuluh faktor strategis kunci yang dapat menjadi prioritas Polres Cimahi dalam penanggulangan kejahatan konvensional. Pemilihan faktor *Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS) didasarkan pada bobot EFAS dan IFAS di atas 0.1, kemudian ditentukan skor akhir melalui perhitungan bobot  $\times$  rating. Hasilnya menunjukkan variasi skor antara 0.267 hingga 0.864, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemilihan dan

penentuan strategi prioritas yang kemudian diklasifikasikan ke dalam strategi jangka pendek, sedang, dan panjang.

**Tabel 3. Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)**

NO	FAKTOR STRATEGI KUNCI	BOBOT	RATING	SKOR	JANGKA		
					PDK	SDG	PJG
1	Meningkatkan kompetensi penyidik	0.089	3	0.267			
2	Mengatasi keterbatasan jumlah personel	0.109	3	0.327			
3	Menekan peredaran miras ilegal dan narkoba	0.108	5	0.540			
4	Mewujudkan program “Lapor Pak Kapolres”	0.108	8	0.864			
5	Manfaatkan teknologi informasi untuk sistem deteksi dini dan pengawasan Kamtibmas	0.077	7	0.539			
6	Menanggulangi fenomena geng motor dan kenakalan remaja	0.106	5	0.53			
7	Menguatkan peran Tomas/Toga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	0.108	8	0.864			
8	Mendorong kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas di wilayah masing-masing	0.069	5	0.345			
9	Meningkatkan intensitas dan kualitas giat preemtif	0.109	7	0.763			
10	Mengupayakan dukungan anggaran lidik sidik	0.118	4	0.472			
<b>Jumlah</b>		<b>1.000</b>					

#### **Strategi Jangka Pendek (skor 0,267 – 0,466)**

Strategi pada kategori ini memiliki urgensi untuk segera ditangani karena berkaitan langsung dengan efektivitas operasional harian. Faktor strategis yang masuk kategori jangka pendek antara lain:

- Meningkatkan kompetensi penyidik (0,267): menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi agar penyelesaian perkara lebih cepat dan profesional.
- Mengatasi keterbatasan jumlah personel (0,327): perlu penataan distribusi berbasis beban kerja serta revitalisasi peran masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa.
- Mendorong kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas (0,345): partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberhasilan strategi kepolisian, sehingga dibutuhkan pola kemitraan dan pemberdayaan komunitas.
- Mengupayakan dukungan anggaran lidik sidik (0,472): kebutuhan anggaran tetap menjadi faktor penting dalam menopang proses penyidikan.

#### **Strategi Jangka Sedang (skor 0,467 – 0,665)**

Strategi dalam kategori jangka sedang lebih berorientasi pada perbaikan sistem dan penguatan kelembagaan dalam jangka menengah. Faktor strategis yang masuk jangka sedang ini meliputi:

- Menekan peredaran miras ilegal dan narkoba (0,540): fokus pada razia, sosialisasi, serta edukasi tentang bahaya miras karena menjadi pemicu kriminalitas.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem deteksi dini dan pengawasan Kamtibmas (0,539): penguatan command center berbasis CCTV dan smart city guna meningkatkan jangkauan pengawasan wilayah rawan.
- Menanggulangi fenomena geng motor dan kenakalan remaja (0,530): menuntut kolaborasi lintas sektor dengan pendidikan, tokoh agama, serta operasi lapangan terpadu.

### **Strategi Jangka Panjang (skor 0,666 – 0,864)**

Faktor strategis yang masuk kategori jangka panjang bersifat fundamental dan berdampak luas dalam jangka panjang. Tiga strategi dengan skor tertinggi adalah:

- Memantapkan program “Lapor Pak Kapolres” (0,864): pengembangan layanan aduan masyarakat berbasis digital dengan integrasi fitur panic button sehingga aksesibilitas meningkat.
- Menguatkan peran Tomas/Toga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (0,864): membangun mitra strategis di tingkat akar rumput melalui forum silaturahmi Kamtibmas, pembekalan hukum, dan edukasi sosial.
- Meningkatkan intensitas dan kualitas giat preemptif (0,763): mengoptimalkan DDS, sosialisasi berbasis media, dan kegiatan komunitas sebagai benteng awal pencegahan kriminalitas.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Cimahi dalam tiga tahun terakhir masih cukup tinggi, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui EFAS, IFAS, dan SFAS mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor strategis yang perlu diprioritaskan. Dari hasil analisis, diperoleh sepuluh faktor kunci yang kemudian diklasifikasikan ke dalam strategi jangka pendek, sedang, dan panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada peningkatan kompetensi penyidik, penataan personel, serta penguatan partisipasi masyarakat dan dukungan anggaran penyidikan. Strategi jangka sedang diarahkan pada penekanan peredaran miras dan narkoba, pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dini, serta penanggulangan geng motor dan kenakalan remaja. Sementara itu, strategi jangka panjang menekankan pada pemantapan program “*Lapor Pak Kapolres*”, penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran hukum, serta peningkatan intensitas giat preemptif. Dengan demikian, metode AHP terbukti efektif dalam membantu Polres Cimahi merumuskan pengambilan keputusan strategis yang lebih sistematis dan responsif terhadap dinamika lingkungan, serta dapat menjadi rujukan dalam upaya penanggulangan kejahatan konvensional secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Nur A (2023). *Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan Konvensional Guna Menurunkan Angka Kriminalitas dalam Rangka Harkamtibmas*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Bahan Ajar Sespimmen Dikreg 65. (2025). *Analitical Hierarchi Process (AHP)*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Bahan Ajar Sespimmen Dikreg 65. (2025). *Berpikir Sistem*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Bahan Ajar Sespimmen Dikreg 65. (2025). *Berpikir Strategis*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Bahan Ajar Sespimmen Dikreg 65. (2025). *Pengambilan Keputusan Taktis*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Barney, J. (1991). *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*. Journal of Management, 17(1).

- Bryson, John M. (1995). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization*. San Fransisco : Jossey-Bass.
- Heru Dwi Purnomo (2023). *Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan Konvensional Era Industri 4.0 Guna Menekan Angka Kriminalitas dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Lembang: Sespim Lemdiklat Polri.
- Hidayat, R., & Taufik, M. (2019). Penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan strategi pencegahan kejahatan perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 101–115.
- Junianto, J. (2022). *Decision Support System for the Prevention of Crime Cases at the Koto Baru Police, Dharmasraya Regency Using the Analytical Hierarchy Process Method* (Thesis, Universitas Dharmas Indonesia).
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. 11th ed. McGraw-Hill.
- Rianto, Setyo. (2022). *Strategic Decision Making Using SWOT Analysis (EFAS, IFAS, and SFAS Approach with AHP)*. Program Doctoral, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill.
- Saaty, T. L. (2008). *Decision making with the analytic hierarchy process*. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83–98.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.